

FAKTOR-FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL DI INDONESIA

Samsubar Saleh

Abstract

The purpose of this research is to analyze the determinants of regional variation in Indonesia poverty. This research uses cross-sectional and pooling data of the period 1996 and 1999.

The empirical results show that the determinants of regional variation in Indonesia poverty are human development index (HDI) (includes: income percapita (YPC), life of expectancy (HH), and mean years of schooling /RS)), income inequality (RG), physical investment (IFP), population without access to health facilities (PNH), and population without access to save water (PNW), and economic crisis (DT).

Keywords: kemiskinan, pooling data, cross-sectional data.

LATAR BELAKANG

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal dan selalu ada di setiap peradaban manusia. Oleh karena itu beralasan sekali bila mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam setiap zamannya tidak pernah lepas dari orang-orang miskin mulai dari awal peradaban hingga sekarang ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia, pada tahun 1996 penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan dunia adalah 1,19 milyar jiwa lebih. Sebagian besar penduduk miskin dunia tersebut hidup di negara-negara berkembang (di benua Asia bagian selatan dan Afrika Sub-Sahara) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Dua kawasan yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan secara tajam adalah Eropa dan Asia Tengah serta Afrika Sub-Sahara. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin di Eropa dan Asia Tengah adalah 7,1 juta orang meningkat menjadi 24,0 juta orang pada tahun 1998. Fenomena yang sama terjadi di Afrika Sub-Sahara yang sebetulnya sudah tinggi pada tahun 1990,

yaitu 242,3 juta orang menjadi 290,9 juta orang pada tahun 1998.

Kemiskinan bukan hanya masalah di tingkat dunia saja. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang juga mengalami masalah ini sejak kemerdekaannya hingga saat ini. Perhitungan jumlah penduduk miskin tingkat nasional dan propinsi di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun sekali mulai tahun 1976 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi.

Pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 54,2 juta atau 40,1%, sementara pada tahun 1996 adalah 22,5 juta atau 11,3% dari total penduduk (lihat Tabel 2). Sampai tahun 1996 penentuan garis kemiskinan sebagai tolak ukur dalam menentukan jumlah penduduk yang miskin masih menggunakan standar lama sehingga belum dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya terutama mengenai cakupan komoditi.

Tabel 1.
Tingkat Kemiskinan Dunia (juta jiwa)

Region	1990	1993	1996	1998
Asia Timur dan Pasifik	452,4 (27,6)	431,9(25,2)	265,1(14,9)	278,3(15,3)
Tidak Termasuk China	92,0(18,5)	83,5(15,9)	55,1(10,0)	65,1(11,3)
Eropa dan Asia Tengah	7,1(1,6)	18,3(4,0)	23,8(5,1)	24,0(5,1)
Amerika Latin dan Caribia	73,8(16,8)	70,8(15,3)	76,0(15,6)	78,2(15,6)
Timur Tengah dan Afrika Utara	5,7(2,4)	5,0(1,9)	5,0(1,8)	5,5(1,9)
Asia Selatan	495,1(44,0)	505,1(42,4)	531,7(42,3)	522,0(40,0)
Afrika Sub-Sahara	242,3(47,7)	273,3(49,7)	289,0(48,5)	290,9(46,3)
Total	1276,4(29)	1304,3(28)	1190,6(25)	1196,9(24)
Tidak Termasuk China	915,9(28,1)	955,9(27,7)	980,5(27,0)	985,7(26,2)

Catatan: garis kemiskinan dunia adalah US\$ 1 per hari yang disesuaikan dengan tingkat daya beli atau purchasing power parity (PPP). Dalam kurung adalah persentase populasi hidup di bawah US\$ 1.

Sumber: World Development Report, World Bank, (2000/2001).

Tabel 2.
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1976 – 1999

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		Populasi di bawah Garis Kemiskinan (juta)			Populasi di bawah Garis Kemiskinan (%)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
1976	4.522	2.849	10,0	44,2	54,2	38,8	40,4	40,1
1978	4.969	2.981	8,3	38,9	47,2	30,8	33,4	33,3
1980	6.831	4.449	9,5	32,8	42,3	29,0	28,4	28,6
1981	9.777	5.877	9,3	31,3	40,6	28,1	26,5	26,9
1984	13.731	7.746	9,3	20,3	35,0	23,1	21,2	21,6
1987	17.381	10.294	9,7	25,7	30,0	20,1	16,1	17,4
1990	20.614	13.295	9,4	17,8	27,2	16,8	14,3	15,1
1993	27.905	18.244	8,7	17,2	25,9	13,5	13,8	13,7
1996	38.246	27.413	7,2	15,3	22,5	9,7	12,3	11,3
1996 ¹	42.031	31.366	9,6	24,9	34,5	13,6	19,9	17,7
1999 ¹	92.409	74.272	15,7	32,7	48,4	19,5	26,1	23,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000). Tanda1 menunjukkan penggunaan standar baru tahun 1998.

Sejak Desember 1998 telah digunakan standar baru. Seperti sebelumnya, standar tersebut juga dinamis, menyesuaikan dengan perubahan pola konsumsi. Namun demikian perbedaan standar 1998 dari standar sebelumnya (1996) lebih dikarenakan oleh perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar, bukan karena pergeseran pola konsumsi. Selain itu, standar baru tersebut juga telah disempurnakan agar dapat dibandingkan antar daerah dengan tingkat harga yang telah distandarkan pada tingkat harga di DKI Jakarta dan dapat dibandingkan antar waktu dengan menyamakan pendapatan riil dari penduduk referensi (BPS, 2000).

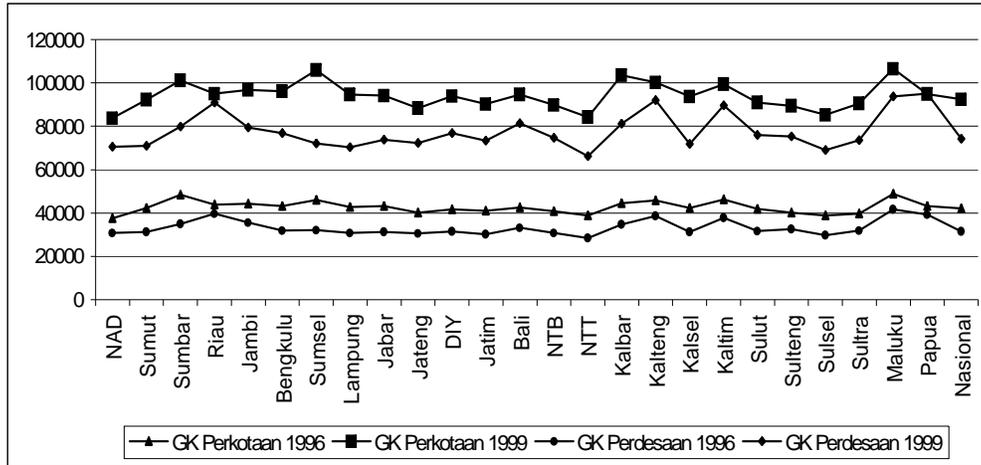
Dari hasil perhitungan ukuran garis kemiskinan makanan dan non makanan di atas dengan standar baru yang disempurnakan (1998), maka diperoleh garis kemiskinan Februari 1996 dan Februari 1999 untuk tingkat propinsi di perkotaan dan perdesaan yang dijelaskan dalam Grafik 1. Garis kemiskinan di perkotaan secara nasional pada tahun 1996 adalah Rp 42.031/kapita/bulan sedangkan di perdesaan adalah Rp 31.366/kapita/bulan. Pada tahun 1999, garis kemiskinan untuk daerah perkotaan secara nasional adalah Rp 92.409/kapita/bulan dengan komposisi Rp 70.959 (76,79%) untuk komponen makanan dan Rp 21.450 (23,21%) untuk komponen non makanan, sedangkan untuk daerah perdesaan adalah Rp 74.272/kapita/bulan dengan komponen untuk makanan adalah Rp 59.822 (80,54%) dan untuk komponen non makanan Rp 14.450 (19,45%).

Dari metode perhitungan BPS tersebut, garis kemiskinan untuk propinsi dan kabupaten pada tahun 1996 dan 1999 juga dapat dihitung meskipun pada tingkat kabupaten tidak dapat dipisahkan antara perkotaan dan perdesaan. Dari hasil perhitungan BPS tersebut tergambar dalam Grafik 1 dan pada Tabel 3.

Rata-rata garis kemiskinan per pulau besar untuk kategori bahan makanan di daerah perkotaan justru berada di Kalimantan, yaitu Rp 33.988/kapita/bulan pada tahun 1996 dan meningkat menjadi Rp 79.049/kapita/bulan pada tahun 1999. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kebutuhan hidup untuk bahan makanan di Kalimantan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat kebutuhan hidup di pulau-pulau besar lainnya. Namun jika dijelaskan dengan tingkat perubahan rata-rata garis kemiskinan daerah perkotaan per pulau, maka perubahan yang tertinggi justru pada Sulawesi dari Rp 29.613/kapita/bulan pada tahun 1996 menjadi Rp 70.811/kapita/bulan pada tahun 1999 atau mengalami kenaikan sebesar 139, 35% atau 46,45% pertahun.

Untuk kategori non makanan, rata-rata tertinggi garis kemiskinan per pulau di daerah perkotaan adalah untuk Maluku dan Papua yang pada tahun 1996 mencapai Rp 12.267/kapita/bulan menjadi Rp 25.137/kapita/bulan atau mengalami kenaikan sebesar 102,63% atau 34,21% pertahun. Secara keseluruhan untuk kategori makanan dan non makanan di daerah perkotaan, rata-rata tertinggi per pulau juga pada Papua dan Maluku yaitu Rp 45.987/kapita/bulan pada tahun 1996 menjadi Rp 100.740/kapita/bulan pada tahun 1999.

Grafik 1.
Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 1996 dan 1999



Tabel 3.
Rata-rata Komposisi Garis Kemiskinan Tahun 1996 dan 1999

Propinsi	Garis Kemiskinan Perkotaan								
	Makanan			Non Makanan			Garis Kemiskinan		
	1996	1999	(%) Perub ¹	1996	1999	(%) Perub ¹	1996	1999	(%) Perub ¹
Sumatera	32345	75474	44,58	11231	20187	26,74	43576	95662	39,89
Jawa, Bali NTB, NTT	30192	71471	45,52	11893	21607	27,13	42085	93078	40,35
Kalimantan	33988	79049	44,15	10713	20111	29,18	44700	99159	40,64
Sulawesi	29613	70811	46,45	10509	18265	24,54	40122	89075	40,69
Maluku & Papua	33720	75603	41,51	12267	25137	34,21	45987	100740	39,70
Nasional	30454	70959	44,33	11577	21450	28,43	42031	92409	39,95
	Garis Kemiskinan Perdesaan								
Sumatera	26528	63515	46,60	6855	12867	29,37	33383	76382	42,95
Jawa, Bali, NTB, NTT ²	23159	58935	51,47	7696	15142	32,47	30855	74078	46,65
Kalimantan	28699	70358	48,24	6936	13321	30,82	35635	83679	44,85
Sulawesi	24422	60093	48,79	7029	13336	30,20	31450	73428	44,49
Maluku & Papua	31218	75328	47,14	9240	19114	35,82	40458	94442	44,55
Nasional	23844	59822	50,30	7522	14450	30,70	31366	74272	45,60

Catatan: ¹ rata-rata pertahun, ² tidak termasuk DKI Jakarta.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000).

Sementara untuk daerah pedesaan, untuk kategori makanan pada tahun 1999 rata-rata tertinggi terdapat di Maluku dan Papua yang mencapai Rp 75.328/kapita/bulan atau mengalami peningkatan 141,42% dibandingkan dengan tahun 1996. Garis kemiskinan kategori makanan tertinggi di kawasan pedesaan juga berada di Maluku dan Papua yang mencapai Rp 19.114/perkapita/bulan pada tahun 1999. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 107,47% dibanding tahun 1996 atau mengalami peningkatan sebesar 35,82% pertahun.

Penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia tahun 1996 dan 1999. Penggunaan kurun waktu 1996 dan 1999 mempunyai beberapa keuntungan karena pada tahun-tahun tersebut perhitungan tingkat kemiskinan mempunyai standar yang sama. Selain itu, tahun 1996 dapat mencerminkan keadaan sebelum terjadinya krisis dan tahun 1999 mencerminkan keadaan setelah krisis monev tahun 1997.

PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN

Berdasarkan garis kemiskinan per propinsi tersebut BPS telah menghitung jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan per propinsi pada tahun 1996 dan 1999. Hasil-hasil perhitungan tersebut dijelaskan pada Tabel 4. Dari total penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 34,16 juta pada tahun 1996, 53,50% berada di Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah sedangkan sisanya atau 46,50% tersebar di propinsi-propinsi lainnya.

Kondisi pada tahun 1996 tidak jauh berubah, dari segi geografis setelah terjadinya krisis ekonomi. Pada tahun 1999 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan secara total tiap propinsi adalah 47,98 juta jiwa. Dari total jumlah tersebut, sebagian

besar atau 57,19% masih terdapat di ketiga propinsi tadi, di Propinsi Jawa Timur sebanyak 21,44%, Jawa Tengah sebanyak 18,25% dan Jawa Barat sebanyak 17,50%, sedangkan sisanya tersebar di propinsi-propinsi lainnya.

Pertumbuhan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan secara absolut paling tinggi terjadi pada Propinsi Jawa Barat yang mencapai 2,29 juta jiwa selama kurun waktu 1996-1999 sedangkan yang terendah terjadi pada Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 6 ribu jiwa. Namun jika dilihat dari persentase perubahan maka propinsi yang paling menderita akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia di daerah perkotaan adalah Propinsi Kalimantan Timur yang mencapai 189,37% atau rata-rata 63,12% pertahun.

Jika dikaji lebih mendalam maka perubahan penduduk di bawah garis kemiskinan di daerah pedesaan pada tahun 1996-1999 tertinggi berada di Propinsi Jambi yang mencapai 127,11% atau rata-rata 42,37% pertahun, sementara perubahan terendah justru terjadi di Propinsi Maluku yang hanya mencapai 2,02% atau rata-rata naik sebesar 0,67% pertahun. Meskipun secara absolut, perubahan tertinggi terjadi di Propinsi Jawa Timur yaitu mencapai 1.990 ribu orang. Hal ini mengindikasikan bahwa propinsi yang paling menderita sebagai akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah Propinsi Jambi meskipun secara absolut yang paling menderita adalah Propinsi Jawa Timur.

Secara total, perubahan di perkotaan ditambah pedesaan yang paling tinggi dalam angka absolut adalah Propinsi Jawa Barat yang mencapai penambahan orang miskin sebanyak 4,04 juta jiwa sedangkan yang terendah adalah Propinsi Sulawesi Utara yang hanya mencapai 29 ribu jiwa. Namun, jika dilihat dari persentase total di perkotaan ditambah pedesaan, maka yang paling menderita adalah Propinsi Kalimantan

Timur yaitu mencapai 123,63% atau meningkat rata-rata 13,75% pertahun sedangkan yang paling rendah adalah Propinsi Sulawesi Utara yang hanya meningkat sebesar 5,98% atau rata-rata 0,67% pertahun.

Secara lebih umum, pada Tabel 5 disajikan indeks atau rasio perhitungan yang menggambarkan kesejahteraan dan kesenjangan masyarakat per propinsi di Indonesia tahun 1996 dan 1999. Indeks atau rasio tersebut adalah indeks pengembangan manusia (IPM) atau *human development indeks* (HDI) dan rasio Gini. HDI merupakan indeks yang menggambarkan keadaan pembangunan sumber daya manusia di daerah yang berasal dari empat komponen, yaitu angka harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Di lain pihak, rasio Gini menggambarkan kesenjangan berdasarkan kelompok

pendapatan. Berdasarkan metode tersebut, HDI tertinggi untuk tahun 1996 dicapai oleh Propinsi DKI Jakarta sedangkan yang terendah oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1999, nilai HDI untuk setiap propinsi mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Rasio Gini pada tahun 1996 secara nasional adalah 0,36 sedangkan pada tahun 1999 menurun menjadi 0,33. Namun demikian, kecenderungan rasio Gini pada tahun 1996 dan 1999 di tingkat propinsi berbeda antara satu propinsi dengan propinsi lainnya. Di antara propinsi yang mengalami pelebaran kesenjangan adalah Propinsi DKI Jakarta yang pada tahun 1996 mempunyai rasio Gini sebesar 0,36 menjadi 0,46 pada tahun 1999. Di lain pihak propinsi yang kecenderungan kesenjagannya untuk menyempit adalah Propinsi DI Yogyakarta dan Propinsi Sulawesi Utara.

Tabel 4.
Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (ribu jiwa)

Propinsi	Perkotaan		% Perub ¹	Perdesaan		% Perub ¹	Perk+Perd		% Perub ¹
	1996	1999	1996-99	1996	1999	1996-99	1996	1999	1996-99
NAD	57,7	104,7	27.15	434,1	497,5	4.87	491,8	602,2	2.49
Sumut	559,0	968,4	24.41	916,7	1004,0	3.19	1475,7	1972,7	3.74
Sumbang	102,5	237,4	43.87	323,8	364,1	4.15	426,3	601,5	4.57
Riau	85,0	142,7	22.63	411,8	447,0	2.85	496,8	589,7	2.08
Jambi	134,3	176,9	10.57	220,2	500,1	42.37	354,5	677,0	10.11
Bengkulu	265,6	566,3	37.74	885,8	1247,0	13.61	1151,4	1813,7	6.39
Sumsel	83,9	97,7	5.48	153,0	204,6	11.24	236,9	302,3	3.07
Lampung	254,1	307,2	6.97	1458,0	1730,0	6.22	1712,2	2037,2	2.11
DKI	215,8	379,6	25.30	-	-	-	215,8	379,6	8.42
Jabar	1993,0	4279,0	38.23	2366,0	4115,0	24.64	4358,7	8393,5	10.29
Jateng	1973,0	3032,0	17.88	4444,0	5723,0	9.59	6417,6	8755,4	4.05
DIY	286,4	482,7	22.85	251,4	306,4	7.29	537,8	789,1	5.19
Jatim	2255,0	3048,0	11.72	5249,0	7239,0	12.64	7503,3	10286	4.12
Bali	86,9	114,5	10.59	140,1	143,3	0.76	227,0	257,8	1.52
NTB	223,6	249,3	3.83	945,7	1028,0	2.89	1169,3	1276,9	1.02
NTT	130,9	146,3	3.92	1264,0	1633,0	9.72	1395,1	1779,0	3.06
Kalbar	69,9	95,7	12.30	815,8	920,6	4.28	885,7	1016,3	1.64
Kalteng	20,6	26,5	9.55	201,2	235,3	5.65	221,8	261,8	2.01
Kalsel	84,4	99,5	5.96	163,1	340,7	36.30	247,5	440,2	8.64
Kaltim	44,2	127,9	63.12	183,5	381,3	35.93	227,7	509,2	13.75
Sulut	85,3	102,9	6.88	390,9	401,8	0.93	476,2	504,7	0.67
Sulteng	64,1	125,7	32.03	371,4	473,7	9.18	435,5	599,4	4.19
Sulsel	315,8	447,2	13.87	952,5	1015,0	2.18	1268,3	1462,0	1.70
Sultra	53,4	68,7	9.55	413,0	436,2	1.87	466,4	504,9	0.91
Maluku	104,2	166,6	19.96	830,5	847,3	0.67	934,7	1013,9	0.94
Papua	36,8	49,6	11.59	793,5	1099,0	12.84	830,3	1148,7	4.26
Indonesia	9586	15644	21.06	24579	32332	10.52	34164	47975	2.49

Catatan: ¹Perubahan rata-rata pertahun.

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000).

Tabel 5.
Human Development Index (HDI) dan Rasio Gini Per Propinsi Tahun 1996 dan 1999

Propinsi	HDI		Rasio Gini	
	1996	1999	1996	1999
NAD	69,4	65,3	0,26	0,27
Sumut	70,5	66,6	0,30	0,27
Sumbar	69,2	65,8	0,28	0,25
Riau	70,6	67,3	0,30	0,27
Jambi	69,3	67,3	0,25	0,26
Bengkulu	68,0	63,9	0,30	0,27
Sumsel	68,4	64,8	0,27	0,28
Lampung	67,6	63,0	0,28	0,29
DKI	76,1	72,5	0,36	0,46
Jabar	68,2	64,6	0,36	0,29
Jateng	67,0	64,6	0,29	0,27
DIY	71,8	68,7	0,38	0,34
Jatim	65,5	61,8	0,31	0,29
Bali	70,1	65,7	0,31	0,28
NTB	56,7	54,2	0,29	0,25
NTT	60,9	60,4	0,30	0,28
Kalbar	63,6	60,6	0,30	0,27
Kalteng	71,3	66,7	0,27	0,27
Kalsel	66,3	62,2	0,29	0,27
Kaltim	71,4	67,8	0,32	0,29
Sulut	71,8	67,1	0,34	0,28
Sulteng	66,4	62,8	0,30	0,30
Sulsel	66,0	63,6	0,32	0,28
Sultra	66,2	62,9	0,31	0,28
Maluku	68,2	67,2	0,27	0,29
Papua	60,2	58,8	0,39	0,44
Indonesia	67,7	64,3	0,36	0,33

Sumber: Indonesia Human Development Report, BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001).

FAKTOR-FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL DI INDONESIA

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan regional di Indonesia dapat dilakukan dengan pendekatan regresi. Dalam pendekatan regresi tersebut, variabel yang berfungsi sebagai variabel dependen adalah variabel tingkat kemiskinan. Dengan demikian model estimasi tingkat kemiskinan di Indonesia per propinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$POV_i = \alpha + \lambda X_i^j + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$POV_{it} = \alpha_{it} + \gamma_i X_{it}^j + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Model (1) merupakan model estimasi dengan menggunakan data *cross section* sedangkan model (2) merupakan model estimasi dengan menggunakan data panel, di mana, *POV* adalah variabel terikat sedangkan X^j adalah variabel-variabel penjelas, *i* dan *t* adalah propinsi ke-*i* dan waktu ke-*t*. Penggunaan model estimasi panel mempunyai beberapa keuntungan terutama penggunaan restriksi terhadap koefisien koefisien estimasi di mana α dan γ dapat mempunyai nilai yang tetap (*fixed*) atau berubah-ubah (*random*).

Variabel-variabel penjelas dalam penelitian ini pada umumnya berasal dari model penelitian Levernier, et al (2002) dan model Ravallion dan Wodon (1999). Tentu saja, tidak semua variabel-variabel dalam kedua penelitian tersebut diikutsertakan dalam penelitian ini dan sebagian variabel lainnya berbeda tingkat pengukurannya dengan kedua penelitian tersebut. Variabel-variabel itu adalah berikut ini:

- a. *YPC* adalah tingkat pendapatan per kapita per propinsi (dalam puluhan ribu rupiah).
- b. *IMP* adalah pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia perkapita per propinsi (dalam ribu rupiah), (penjumlahan pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; sektor kesehatan, kesejahteraan, peranaan wanita, anak, dan remaja; sektor tenaga kerja; dan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi).

- c. *IFP* adalah pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik per kapita per propinsi (dalam ribuan rupiah), (merupakan pengurangan total pengeluaran pembangunan terhadap IMPC).
- d. *HH* adalah angka harapan hidup (dalam tahun).
- e. *MH* adalah angka melek huruf persentase dari total penduduk.
- f. *RS* adalah rata-rata lama bersekolah penduduk (dalam tahun).
- g. *HDI* adalah indeks pengembangan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI).
- h. *GEI* adalah indeks partisipasi wanita dalam ekonomi dan politik atau *gender empowerment index* atau lebih tepat disitilahkan *women empowerment index*.
- i. *RG* adalah rasio Gini (dalam persen).
- j. *PNH* adalah rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap fasilitas kesehatan (dalam persen).
- k. *PNW* adalah rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap air bersih.
- l. *DT* adalah variabel boneka untuk waktu (*dummy variable time*) yang mencerminkan sebelum dan sesudah terjadinya krisis. Nilai 0 untuk tahun 1996 dan nilai 1 untuk tahun 1999.

Variabel *YPC*, *IMP*, *IFP*, *HH*, *MH*, *RS*, *HDI*, dan *GEI* diharapkan berpengaruh negatif terhadap *POV* sedangkan variabel *RG*, *PNH*, *PNW*, dan *DT* diharapkan berpengaruh positif. Tentu saja secara teoritis kemungkinan adanya multikolinearitas antar variabel-variabel di atas adalah nyata. Misalnya antara variabel *HDI* dengan *HH*, *MH*, *RS*, dan *YPC* yang merupakan unsur-unsur perhitungan *HDI* sendiri. Oleh karena

itu, akan dipresentasikan beberapa model alternatif untuk menghindari hal tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari *Indonesia Human Development Report* (2001). Analisis data menggunakan data per propinsi seluruh Indonesia tahun 1996 dan 1999. Hasil empirik estimasi ditampilkan dalam Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8.

Tabel 6 menjelaskan hasil-hasil estimasi berdasarkan data *cross-section* tahun 1996 dan 1999. Tiap tahun disajikan beberapa spesifikasi yang berbeda untuk menghindari terjadinya multikolinearitas, terutama hasil-hasil estimasi antara 1996(1) dengan 1996(2) dan 1999(1) dengan 1999(2). Sebagaimana diketahui bahwa perhitungan HDI didasarkan pada YPC, HH, MH, dan RS sehingga jika diestimasi dalam satu persamaan kemungkinan terjadinya multikolinearitas sangat tinggi. Hasil-hasil estimasi 1996(3) dan 1999(3) adalah estimasi-estimasi yang hanya menyajikan variabel-variabel yang signifikan saja berdasarkan estimasi 1996(1) dan 1999(1). Di lain pihak hasil-hasil estimasi 1996(4) dan 1999(4) menyajikan variabel-variabel yang signifikan saja berdasarkan estimasi-estimasi 1996(2) dan 1999(2).

Berdasarkan hasil empirik yang dijelaskan pada Tabel 6 dapat ditarik kesimpulan utama bahwa tidak semua komponen dalam HDI signifikan dalam menjelaskan variasi kemiskinan. Namun demikian, gabungan dari komponen-komponen tersebut yang diwakili oleh HDI sendiri ternyata menjadi variabel utama yang secara konsisten (baik pada tahun 1996 maupun 1999) menjelaskan tingkat kemiskinan antar propinsi (lihat persamaan 1996(2), 1996(4), 1999(2) dan 1999(4)). Pengaruh HDI ini adalah negatif yang berarti kenaikan HDI akan menurunkan tingkat kemiskinan. Kesimpulan utama ini sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa kesimpulan yang menarik lainnya adalah *pertama*, pendapatan perkapita

(YPC) ternyata berpengaruh negatif terhadap rasio kemiskinan per propinsi pada tahun 1996 (persamaan 1996(1) dan 1996(3)). Pada tahun 1999 variabel ini ternyata menjadi tidak signifikan. *Kedua*, investasi fisik dan sumberdaya manusia oleh pemerintah daerah ternyata tidak berpengaruh dalam menanggulangi kemiskinan di daerah baik pada tahun 1996 maupun 1999.

Ketiga, merupakan hal yang menarik bahwa partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik ternyata belum berpengaruh secara signifikan terhadap rasio kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik belum membawa dampak yang baik bagi penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 1996 dan 1999. *Keempat*, tingkat melek huruf (MH) pada tahun 1996 ternyata signifikan dalam menjelaskan kemiskinan antar propinsi terutama pada estimasi 1996(3) sementara rata-rata bersekolah (RS) juga signifikan terutama pada estimasi 1999(3).

Kelima, tingkat rasio Gini (RG) ternyata berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap rasio kemiskinan terutama pada tahun 1999 (lihat estimasi 1999(3)). Hal ini mengindikasikan bahwa setelah krisis kenaikan kesenjangan pendapatan akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Terakhir, berdasarkan kriteria *Adjusted-R²*, hasil-hasil estimasi yang paling baik dalam menjelaskan variasi kemiskinan di atas adalah estimasi 1996(3) pada tahun 1996 dan estimasi 1999(3) pada tahun 1999.

Hasil yang hampir mirip dengan analisis *cross section* juga diindikasikan oleh hasil-hasil empirik regresi dengan menggunakan data panel sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7. Sekali lagi, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa variabel yang konsisten pada tahun 1996 dan 1999 berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap rasio kemiskinan per propinsi adalah indeks pengembangan manusia (HDI) (lihat estimasi (1.2)-(2.2)).

Hasil-hasil lainnya mengindikasikan bahwa hanya pada estimasi (2.1), variabel pendapatan perkapita (YPC) mempunyai pengaruh yang signifikan. Investasi sumber daya manusia (IMP) dan investasi fisik (IFP) oleh pemerintah daerah juga tidak signifikan dalam menjelaskan tingkat kemiskinan. Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas

kesehatan (PNH) ternyata signifikan dan positif dalam menjelaskan tingkat kemiskinan kecuali pada estimasi (1.1), (1.2), dan (2.2). Hasil ini hampir sama dengan hasil empirik yang menggunakan data *cross section* sebelumnya.

Tabel 6.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Kemiskinan (POV) Per Propinsi
Tahun 1996 dan 1999 (Regresi Data Lintas Propinsi)

Variabel Penjelas	Tahun							
	1996				1999			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Konstan	310,11 (4,63) ^a	132,51 (2,43) ^b	343,58 (6,70) ^a	144,97 (6,42) ^a	-109,10 (-0,58)	79,31 (1,46)	55,30 (3,29) ^a	139,47 (3,41) ^a
YPC	-3,91 (-2,35) ^b	-	-4,59 (-4,66)	-	2,79 (0,99)	-	-	-
HH	-0,56 (-0,63)	-	-	-	-0,48 (-0,69)	-	-	-
MH	0,51 (1,03)	-	-0,66 (-4,29)	-	0,09 (0,15)	-	-	-
RS	0,24 (0,04)	-	-	-	-8,46 (-1,70)	-	-8,58 (-4,22) ^a	-
HDI	-	-1,75 (-6,03) ^a	-	-1,85 (-5,66) ^a	-	-1,73 (-3,80) ^a	-	-1,80 (-2,86) ^a
IMP	0,10 (0,12)	0,13 (0,19)	-	-	-3,53 (-1,48)	-2,20 (-1,04)	-	-
IFP	-0,04 (-0,29)	0,02 (0,18)	-	-	0,59 (1,58)	0,39 (1,27)	-	-
GEI	0,28 (0,57)	0,15 (0,34)	-	-	0,50 (0,92)	0,62 (1,13)	-	-
RG	0,19 (0,23)	0,04 (0,05)	-	-	0,97 (1,77) ^c	0,80 (1,65)	0,94 (2,64) ^b	-
PNH	0,25 (0,63)	0,41 (1,87) ^c	-	-	0,44 (1,97) ^c	0,47 (1,93)	-	-
PNW	-0,17 (-0,96)	-0,20 (-1,10)	-	-	-0,25 (-1,52)	-0,22 (-1,24)	-	-
Adj-R ²	0,42	0,45	0,55	0,47	0,34	0,32	0,37	0,26
F-statistik	2,81	3,92	16,55	23,60	2,28	2,67	8,33	9,70
N	26	26	26	26	26	26	26	26

Catatan: angka dalam kurung adalah nilai-t berdasarkan White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors and Covariance, ^a signifikan 1%, ^b signifikan 5%, dan ^c signifikan 10%.

Tabel 7.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Kemiskinan (POV) Per Propinsi Tahun 1996 dan 1999 (Regresi Panel Data Tanpa Penimbang)

Variabel Penjelas	(1.1)	(2.1)	(3.1)	(1.2)	(2.2)	(3.2)
Konstan	-	206,23	-	-	103,28	-
	-	(3,71) ^a	-	-	(3,24) ^a	-
YPC	0,60	-2,60	0,58	-	-	-
	(0,66)	(-2,37) ^b	(1,22)	-	-	-
HH	-0,39	-0,44	-1,23	-	-	-
	(-0,58)	(-0,74)	(-1,37)	-	-	-
MH	-0,06	-0,31	1,02	-	-	-
	(-0,16)	(-0,95)	(1,17)	-	-	-
RS	-5,55	-3,44	0,85	-	-	-
	(-1,36)	(-0,90)	(0,12)	-	-	-
HDI	-	-	-	-1,03	-1,80	0,15
	-	-	-	(-4,25) ^a	(-7,75) ^a	(0,25)
IMP	-1,18	-0,88	-0,50	-1,25	-0,88	-0,45
	(-1,33)	(-1,00)	(-0,45)	(-1,58)	(-1,07)	(-0,45)
IFP	0,27	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19
	(1,85) ^c	(1,33)	(0,88)	(1,36)	(1,37)	(1,05)
GEI	0,50	0,44	0,12	0,96	0,40	0,25
	(1,62)	(1,47)	(0,57)	(4,34) ^a	(1,43)	(1,61)
RG	0,73	0,69	0,15	0,94	0,58	0,12
	(1,79) ^c	(1,80) ^c	(0,39)	(2,79) ^a	(1,85) ^c	(0,31)
PNH	0,48	0,32	-0,05	0,60	0,42	-0,05
	(1,98) ^c	(1,33)	(-0,49)	(3,03) ^a	(2,75) ^a	(-0,58)
PNW	-0,19	-0,20	-0,14	-0,09	-0,19	-0,29
	(-1,39)	(-1,60)	(-0,55)	(-0,70)	(-1,61)	(-1,33)
DT	0,60	7,22	5,56	5,21	-2,00	7,64
	(0,66)	(1,14)	(1,15)	(1,24)	(-0,36)	(2,45) ^b
Adj-R ²	0,40	0,47	0,94	0,38	0,49	0,95
F-statistik	4,41	5,05	24,59	5,49	7,06	27,83
N	52	52	52	52	52	52

Catatan: lihat Tabel 6. Pembagian model didasarkan pada konstanta. (1.1), (1.2) (none), (2.1), (2.2) (common), dan (3.1) (3.2) (fixed effects).

Tabel 8.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Kemiskinan (POV) Per Propinsi Tahun 1996 dan 1999 (GLS Panel Dengan Penimbang)

Variabel Penjelas	(1.1T)	(2.1T)	(3.1T)	(4.1T)	(1.2T)	(2.2T)	(3.2T)	(4.2T)
Konstan	-	232,20	-	120,27	-	100,63	-	98,25
	-	(7,82) ^a	-	(2,18) ^b	-	(7,26) ^a	-	(3,21) ^a
YPC	0,21	-2,97	0,78	-0,43	-	-	-	-
	(0,72)	(-6,26) ^a	(3,38) ^a	(-0,60)	-	-	-	-
HH	-0,21	-0,46	-1,43	-0,82	-	-	-	-
	(-0,71)	(-2,39) ^b	(-2,64) ^b	(-1,37)	-	-	-	-
MH	0,17	-0,06	1,21	-0,22	-	-	-	-
	(0,83)	(-0,32)	(1,92) ^c	(-0,54)	-	-	-	-
RS	-7,73	-5,75	1,57	-3,67	-	-	-	-
	(-3,55) ^a	(-4,03) ^a	(0,30)	(-0,98)	-	-	-	-
HDI	-	-	-	-	-1,02	-1,76	0,35	-1,53
	-	-	-	-	(-9,18) ^a	(-15,3) ^a	(1,17)	(-3,55) ^a
IMP	-0,67	-0,17	-0,71	-0,63	-0,69	-0,23	-0,91	-0,71
	(-1,28)	(-0,36)	(-1,10)	(-0,92)	(-1,57)	(-0,54)	(-2,13) ^b	(-1,09)
IFP	0,24	0,12	0,22	0,24	0,11	0,07	0,26	0,23
	(2,50) ^b	(1,82) ^c	(1,63)	(1,84) ^c	(1,72) ^c	(1,28)	(3,16) ^a	(1,76) ^c
GEI	0,52	0,24	0,05	0,32	0,85	0,38	0,30	0,35
	(5,51) ^a	(3,42) ^a	(0,38)	(1,86) ^c	(6,85) ^a	(4,64) ^a	(3,66) ^a	(2,04) ^b
RG	0,82	0,78	0,20	0,20	1,06	0,63	0,03	0,22
	(3,50) ^a	(3,29) ^a	(1,29)	(0,75)	(4,15) ^a	(2,27) ^b	(0,17)	(0,92)
PNH	0,30	0,13	-0,05	0,03	0,40	0,33	-0,03	0,05
	(3,36) ^a	(1,81) ^c	(-1,04)	(0,28)	(4,59) ^a	(3,88) ^a	(-0,62)	(0,55)
PNW	-0,14	-0,19	-0,08	-0,15	-0,02	-0,18	-0,24	-0,12
	(-2,63) ^b	(-4,14) ^a	(-0,62)	(-1,06)	(-0,40)	(-3,28) ^a	(-1,74) ^c	(-0,91)
DT	10,96	7,52	4,12	10,78	8,06	-0,19	8,53	2,47
	(9,97) ^a	(6,66) ^a	(2,04) ^c	(4,12) ^a	(6,95) ^a	(-0,12)	(4,67) ^a	(1,07)
Adj-R ²	0,98	0,99	0,99	0,94	0,97	0,98	0,99	0,94
N	52	52	52	52	52	52	52	52

Catatan: lihat Tabel 6. Pembagian model lihat Tabel 7.

Tingkat partisipasi politik dan ekonomi perempuan (GEI) meskipun signifikan, ternyata tandanya tidak sesuai dengan yang diharapkan (estimasi (1.2)). Kecuali pada estimasi (3.1) dan (3.2), kesenjangan pendapatan (RG) ternyata juga signifikan dan positif dalam mempengaruhi kemiskinan. Kenaikan rasio Gini yang menggambarkan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan akan memperburuk kemiskinan. Akhirnya, pengaruh krisis ekonomi yang diwakili oleh variabel boneka

DT ternyata hanya signifikan pada estimasi (3.2). Hal ini mengindikasikan bahwa krisis ekonomi telah mendorong memburuknya rasio kemiskinan per propinsi di Indonesia atau sekitar 7,64% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1996.

Hasil-hasil empirik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7 ternyata masih belum memuaskan karena sebagian besar variabel penjelas ternyata tidak signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hasil estimasi yang mengandung heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode estimasi *Generalized Least Squares* (GLS). Metode ini menggunakan varian-varian dari *cross section* sebagai faktor penimbang (estimasi (1.1T)-(3.1T) dan (1.2T)-(3.2T)) dan komponen-komponen varian dari model (estimasi (4.1T) dan (4.2T)). Hasil empirik estimasi dengan metode *GLS* tersebut ditampilkan pada Tabel 8.

Hasil-hasil empirik yang diperoleh dengan berbagai macam estimasi yang dilakukan ternyata lebih informatif daripada hasil-hasil empirik sebelumnya. Dengan menggunakan komponen-komponen HDI sebagai variabel penjelas menghasilkan lebih banyak variabel-variabel penjelas yang signifikan. Penggunaan berbagai macam estimasi dengan asumsi terhadap koefisien-koefisiennya memberikan hasil estimasi yang cukup berbeda. Misalnya: dengan menggunakan estimasi (1.1T) dan (3.1T) mempunyai perbedaan yang mendasar dengan hasil estimasi (2.1T) dan (4.1T) tentang nilai dan signifikansi variabel YPC. Dengan melihat nilai *Adjusted-R²* untuk estimasi (1.1T) - (4.1T) dan tingkat signifikansi variabel-variabel penjelasnya, maka dapat disimpulkan bahwa estimasi yang paling baik adalah estimasi (2.1T).

Lebih lanjut, dengan menggunakan variabel komposit HDI sebagai variabel penjelas ditambah dengan variabel-variabel penjelas lainnya di luar komponen HDI menghasilkan estimasi (1.2T) sampai (4.1T) pada Tabel 8. Hampir senada dengan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa estimasi (2.2T) merupakan estimasi yang lebih baik dalam menjelaskan tingkat kemiskinan antar propinsi.

Di dalam estimasi (2.1T) dan (2.2T) diketahui bahwa pendapatan perkapita (YPC) mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan antar propinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan

menurunkan tingkat kemiskinan. Di lain pihak kesenjangan pendapatan (RG) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan yang mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan perkapita masih belum merata sehingga masih berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Angka harapan hidup (HH) dan rata-rata bersekolah (RS) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, kenaikan angka harapan hidup dan rata-rata bersekolah akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dengan menggabungkan keempat komponen di atas menjadi indeks pengembangan manusia (HDI), diperoleh hasil yang mengindikasikan signifikannya pengaruh negatif HDI terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Investasi sumberdaya manusia (IMP) oleh pemerintah daerah ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Di lain pihak, investasi fisik (IFP) justru signifikan, namun dengan arah yang tidak diharapkan, yaitu positif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah justru meningkatkan kemiskinan. Investasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut selama ini, kemungkinan besar tidak merata dan tidak menyentuh kantong-kantong kawasan miskin di daerahnya.

Tingkat partisipasi politik dan ekonomi dari perempuan ternyata juga signifikan namun dengan arah yang juga tidak diharapkan, yaitu positif. Hal ini kemungkinan disebabkan kesenjangan tingkat partisipasi politik dan ekonomi perempuan di sektor-sektor formal dengan sektor-sektor informal atau sektor ekonomi dan politik yang sebagian besar ditekuni oleh keluarga-keluarga miskin di daerah.

Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas kesehatan (PNH) ternyata signifikan

dan positif pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, kenaikan populasi penduduk ini akan memperburuk tingkat kemiskinan antar propinsi. Di lain pihak, populasi penduduk yang tidak mempunyai akses pada air bersih (PAW) ternyata juga signifikan, namun dengan pengaruh yang negatif. Hal tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Terakhir adalah pengaruh krisis ekonomi yang dicerminkan variabel boneka waktu (DT) terhadap kemiskinan. Dengan menggunakan estimasi (2,1T), ternyata krisis ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan meskipun dengan estimasi (2,2T) tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan tahun 1999 lebih tinggi sebesar 10,96% dibandingkan dengan tahun 1996.

KESIMPULAN

Ada dua model estimasi final yang dipresentasikan dalam penelitian ini. Perbedaan antara kedua model estimasi tersebut terletak pada penggunaan variabel penjelas HDI. Model estimasi pertama adalah dengan menggunakan komponen-komponen HDI sebagai variabel-variabel penjelas. Di lain pihak, model estimasi

kedua menggunakan indeks komposit HDI sendiri sebagai variabel penjelas.

Berdasarkan hasil-hasil empirik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi.

Beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah berikut ini. Pertama, peningkatan kualitas pengembangan manusia melalui peningkatan pendapatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kedua, di saat bersamaan dilakukan kebijakan yang dapat mendukung pemertaan pendapatan. Ketiga, investasi fisik dilakukan secara merata dengan prioritas pada kawasan-kawasan padat keluarga miskin. Keempat, pemerataan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor informal ekonomi dan politik, sektor di mana sebagian besar keluarga miskin berasal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2000), *Tingkat Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten* (Penjelasan Ringkas), Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2000), *Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tingkat Propinsi Seluruh Indonesia*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan United Nations Development Programme, (2001), *Indonesia Human Development Report: Towards a New Consensus, Democracy and Human Development in Indonesia*, Jakarta.
- Levernier, W., Mark D.P., dan D.S. Rickman, (2000), The Causes of Regional Variations in US Poverty: Across-County Analysis, *Journal of Regional Science*, 43, 3: 473-497.
- Ravallion, M., dan Quentin Wodon, (1999), Poor Areas, or Only Poor People?, *Journal of Regional Science*, 39, 4, 689-711.
- World Bank, (2001), *World Development Report 2000/2001*.

LAMPIRAN

STATISTIK DESKRIPTIF											
Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata	Std. Error Rata-rata	Std. Deviasi	Varian	Skewness		Kurtosis		Jumlah Observasi
							Nilai	Std. Error	Nilai	Std. Error	
POV96	2,35	44,57	19,41	2,11	10,74	115,39	0,95	0,46	0,42	0,89	26
YPC96	54,43	61,23	58,20	0,26	1,32	1,74	-0,16	0,46	2,59	0,89	26
HH96	54,90	70,20	64,57	0,63	3,23	10,46	-0,74	0,46	2,07	0,89	26
MH96	67,40	96,80	86,67	1,59	8,11	65,82	-0,98	0,46	0,29	0,89	26
RS96	4,60	9,50	6,43	0,19	0,98	0,97	0,80	0,46	2,73	0,89	26
IMP96	0,79	15,68	3,05	0,61	3,09	9,52	3,12	0,46	11,37	0,89	26
IFP96	5,24	85,92	22,55	3,41	17,37	301,66	2,18	0,46	6,22	0,89	26
GEI96	52,20	66,40	59,57	0,72	3,66	13,40	-0,17	0,46	-0,58	0,89	26
RG96	25,00	39,00	30,58	0,70	3,55	12,57	0,89	0,46	0,45	0,89	26
PNH96	0,50	35,30	12,64	1,69	8,64	74,67	0,89	0,46	0,51	0,89	26
PNW96	36,00	83,80	55,40	2,30	11,73	137,69	0,48	0,46	0,01	0,89	26
HDI96	56,70	76,10	67,72	0,80	4,08	16,64	-0,82	0,46	1,46	0,89	26
BH96	3,20	32,60	13,33	1,59	8,11	65,82	0,98	0,46	0,29	0,89	26
POV99	3,99	54,75	23,66	2,38	12,12	146,82	0,87	0,46	0,82	0,89	26
YPC99	56,28	59,78	57,61	0,17	0,87	0,75	0,69	0,46	0,48	0,89	26
HH99	57,80	71,10	66,21	0,59	3,00	8,99	-0,78	0,46	1,24	0,89	26
MH99	71,20	97,80	89,24	1,43	7,27	52,84	-1,07	0,46	0,44	0,89	26
RS99	5,20	9,70	6,88	0,19	0,95	0,90	0,72	0,46	1,87	0,89	26
IMP99	0,61	8,25	2,44	0,37	1,87	3,51	1,57	0,46	2,55	0,89	26
IFP99	4,95	49,19	21,38	2,43	12,39	153,49	0,65	0,46	-0,36	0,89	26
GEI99	38,10	58,80	48,83	0,92	4,71	22,14	0,02	0,46	0,14	0,89	26
RG99	25,00	46,00	29,19	0,98	4,97	24,72	2,76	0,46	7,37	0,89	26
PNH99	2,00	43,30	24,45	1,91	9,73	94,73	-0,02	0,46	0,05	0,89	26
PNW99	34,20	78,40	52,44	2,13	10,85	117,62	0,54	0,46	0,03	0,89	26
HDI99	54,20	72,50	64,47	0,71	3,62	13,10	-0,63	0,46	1,83	0,89	26
BH99	2,20	28,80	10,76	1,43	7,27	52,84	1,07	0,46	0,44	0,89	26